



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SATU JUTA SATU PEKARANGAN DI DESA TOHITISARI KECAMATAN TOILI JAYA KABUPATEN BANGGAI**Anies Handayani**

Ilmu Pemerintahan, Universitas Tompotika Luwuk

Email : anieshandayani2101@gmail.com**Abstrak**

Program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Program ini ditujukan untuk mendorong masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, agar mampu mengoptimalkan pekarangannya untuk kegiatan produktif seperti budidaya ayam pedaging dan tanaman hortikultura. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jumlah informan sebanyak 8 orang, terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun, serta masyarakat penerima program. Teknik pengambilan informan menggunakan Snowball Sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program SJSP di Desa Tohitisari secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan, adanya tambahan penghasilan rumah tangga, serta tumbuhnya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri masyarakat. Penerapan teori ACTORS menunjukkan bahwa unsur authority, confidence and competence, trust, opportunities, responsibilities, dan support telah sebagian besar terwujud. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, sarana produksi, dan pemasaran hasil ternak yang belum optimal. Kurangnya pendampingan teknis dan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penghambat keberlanjutan program. Meskipun demikian, program SJSP berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan apabila didukung oleh pelatihan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta dukungan penuh dari pemerintah desa dan daerah.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Masyarakat; Program Satu Juta Satu Pekarangan**Abstract**

The One Million One Yard Program (SJSP) is an initiative of the Banggai Regency Government to increase the economic independence of the community through the utilization of yard land. This program is aimed at encouraging communities, especially in rural areas, to be able to optimize their yards for productive activities such as broiler chicken cultivation and horticultural crops. This type of research is descriptive

qualitative research with a total of 8 informants, consisting of the Village Head, the Head of the BPD, the Head of Welfare, the Head of the Hamlet, and the community recipients of the program. The informant selection technique used Snowball Sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model which includes three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results of the study indicate that the implementation of the SJSP program in Tohtisari Village has generally gone well. This is indicated by increased community skills in utilizing yards, additional household income, and a growing sense of responsibility and self-confidence in the community. The application of the ACTORS theory shows that the elements of authority, confidence and competence, trust, opportunities, responsibilities, and support have been largely realized. However, program implementation still faces obstacles in the form of limited capital, production facilities, and suboptimal marketing of livestock products. Lack of technical assistance and coordination between institutions also hamper the program's sustainability. Nevertheless, the SJSP program has significant potential to improve the welfare of rural communities if supported by ongoing training, institutional strengthening, and full support from village and regional governments.

Keywords: Empowerment; Community; One Million One Yard Program

Pendahuluan

Desa Tohtisari yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar, terletak di Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai. Namun, kesulitan dalam memanfaatkan lahan pekarangan masih menjadi kendala besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rifqi et al., 2025). Banyak pekarangan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif seperti berkebun atau menanam tanaman pangan (Feto et al., 2025). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kemampuan, dan kesadaran masyarakat umum akan potensi pekarangan sebagai sumber pangan dan sumber penghasilan tambahan.

Dalam upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan, pemerintah pusat dan daerah telah meluncurkan sejumlah inisiatif pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu taktik utama untuk menyelesaikan masalah ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif ekonomi regional. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal, inisiatif ini berupaya meningkatkan potensi ekonomi masyarakat desa. Diharapkan masyarakat akan menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan memperoleh lebih banyak uang melalui pelatihan kewirausahaan, penciptaan produk lokal, dan perluasan akses pasar (Huda, 2020).

Sebagai respon terhadap tantangan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Banggai sejak tahun 2021 menggulirkan program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP). Program ini bertujuan mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk kegiatan produktif, seperti budidaya tanaman hortikultura, ternak unggas, maupun pengolahan hasil pertanian. Harapannya, inisiatif ini mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat kemandirian pangan, sekaligus mengurangi angka kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan. (Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., & Faried, A. I., 2023).

Pemanfaatan pekarangan terbukti bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat. (Suardi et al., 2021) menemukan

bahwa membantu masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan dapat meningkatkan produksi sayuran hingga tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan keluarga tetapi juga dijual ke pasar lokal, sehingga menghasilkan lebih banyak uang bagi keluarga. Dalam penelitian lain, (Rifqi et al., 2025) menemukan bahwa menanam sayuran di kebun rumah dapat meningkatkan kemandirian pangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pertanian.

Pendidikan dan dukungan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan inisiatif pemberdayaan masyarakat (Suhardi et al., 2021). Pendidikan juga merupakan suatu hal yang penting dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola pekarangan mereka secara efektif melalui pelatihan dan bantuan.

Efektivitas pemanfaatan lahan pekarangan dapat ditingkatkan dengan penggunaan teknologi yang tepat, seperti sistem budikdamber (budidaya ikan dalam ember) dan vertikultur. Vertikultur, praktik menanam tanaman di pekarangan rumah, dapat menjadi solusi bagi keterbatasan lahan di daerah perkotaan, sedangkan (Hasanah et al., 2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem budikdamber di pekarangan rumah dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

Namun, implementasi SJSP di Desa Tohitisari Kecamatan Toili Jaya memperlihatkan sejumlah persoalan. Pertama, kendala teknis seperti keterbatasan sarana produksi, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam mengelola pekarangan masih cukup nyata. Kedua, dari sisi sosial, tidak semua penerima program menunjukkan partisipasi aktif dan keberlanjutan pemanfaatan bantuan yang diberikan. Ketiga, dari aspek kelembagaan, koordinasi antar-perangkat desa, kelompok tani, dan lembaga pendukung masih belum optimal sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya terintegrasi.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program yang ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini penting karena temuannya dapat digunakan sebagai panduan bagi masyarakat desa, manajemen Bumdes, dan pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan inisiatif saat ini. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis untuk menciptakan inisiatif pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai aktor utama dan tidak dapat hanya mengandalkan strategi top-down. Hal ini sesuai dengan perspektif Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang menyoroti perlunya memperkuat ekonomi desa melalui administrasi yang terfokus dan transparan, berdasarkan potensi lokal (Suharto, 2020).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ialah suatu penelitian yang menyajikan data dari hasil penelitian dengan bentuk penjelasan serta analisis terkait dengan peristiwa, sikap, fenomena serta kegiatan sosial secara individual ataupun kelompok (Sugiyono, 2021). Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilaksanakan dan tempat pengambilan data penelitian. Penelitian memilih lokasi penelitian di Desa Tohitisari Kabupaten Banggai. Jumlah

informan ada 8 orang. Data yang diterapkan pada metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer serta data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Satu Juta Satu Pekarangan di Desa Tohitisari Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai

a. Authority (wewenang) Unsur authority atau kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat merujuk pada bagaimana kekuasaan, tanggung jawab, dan legitimasi didistribusikan serta dijalankan dalam pelaksanaan program. Dalam konteks Program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Desa Tohitisari, unsur ini menjadi fondasi penting yang menentukan arah koordinasi dan pelaksanaan program di tingkat lokal.

1) Struktur Tanggung Jawab dalam Program SJSP

Struktur tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Fadel dan Musyarofah (2022) dalam teori ACTORS, dimana authority bukan hanya tentang kepemilikan kekuasaan formal, tetapi juga tentang bagaimana kewenangan tersebut didistribusikan secara fungsional kepada berbagai pihak yang terlibat. Pembagian tugas yang jelas antara Kepala Desa, Sekretaris, Kasi Kesejahteraan, dan Kepala Dusun menunjukkan upaya desentralisasi kewenangan dalam pelaksanaan program.

2) Mekanisme Pelimpahan Tugas dan Formalisasi Kewenangan

Ini menunjukkan bahwa kewenangan tidak hanya terpusat di tingkat desa, tetapi juga didelegasikan hingga ke level dusun sebagai unit terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penerima program. Formalisasi kewenangan melalui SK ini penting karena memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi setiap pihak yang terlibat. Menurut Ritonga et al. (2023), formalisasi kewenangan dalam implementasi program desa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun ada formalisasi melalui SK, efektivitas pelimpahan kewenangan juga bergantung pada pemahaman dan kapasitas pihak-pihak yang menerima kewenangan tersebut. Dalam penelitian Andriyani et al. (2017) tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, disebutkan bahwa kejelasan pembagian tugas dan wewenang menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program pemberdayaan.

3) Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Penerima program 3 dan 4 juga mengonfirmasi kebebasan mereka dalam mengelola pekarangan. Kebebasan yang diberikan kepada masyarakat ini menunjukkan penerapan prinsip pemberdayaan yang baik, dimana masyarakat tidak hanya menjadi objek pasif yang menerima bantuan, tetapi diberi ruang untuk menjadi subjek aktif yang dapat menentukan cara terbaik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Huda (2020), bahwa pemberdayaan ekonomi lokal memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya lokal.

Yunandar (2019) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Puton juga menemukan bahwa pemberian ruang partisipasi kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses pemberdayaan. Ketika masyarakat merasa memiliki

kewenangan untuk menentukan sendiri bagaimana mereka akan mengelola program, rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program tersebut akan meningkat. Secara keseluruhan, implementasi unsur *authority* dalam Program SJSP di Desa Tohitisari dapat dinilai cukup baik. Terdapat struktur kewenangan yang jelas dan terlembagakan, pelimpahan tugas yang terorganisir, serta pemberian ruang partisipasi kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan dalam aspek koordinasi antar tingkatan kewenangan, peningkatan kapasitas pihak-pihak yang menerima kewenangan, serta pengoptimalan fungsi pengawasan oleh BPD. Implementasi *authority* yang efektif menjadi fondasi penting bagi keberhasilan unsur-unsur pemberdayaan lainnya dalam teori ACTORS.

b. *Confidence and Competence* (rasa percaya diri dan kemampuan)

Unsur *confidence and competence* dalam pemberdayaan masyarakat merujuk pada bagaimana program mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan teknis masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks Program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Desa Tohitisari, unsur ini menjadi sangat krusial karena keberhasilan pemanfaatan pekarangan sangat bergantung pada keterampilan dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola usaha peternakan dan pertanian rumahan.

1) Pelatihan dan Bimbingan Teknis sebagai Fondasi Peningkatan Kompetensi

Dari pernyataan penerima program dapat dikatakan bahwa pelatihan yang diberikan mencakup aspek-aspek teknis yang spesifik dan praktis, mulai dari cara merawat, memberi pakan, hingga pencegahan penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan langsung dapat diterapkan oleh masyarakat. Namun, pernyataan Penerima program 4 tentang pelatihan singkat mengindikasikan bahwa durasi pelatihan mungkin masih terbatas, yang dapat menjadi area untuk perbaikan di masa mendatang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suhardi et al. (2021) yang menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Mereka menemukan bahwa masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola pekarangan mereka secara efektif melalui pelatihan dan bantuan yang terstruktur. Penelitian Damayanti et al. (2023) juga menegaskan bahwa pemberdayaan wanita dalam pemanfaatan pekarangan rumah memerlukan dukungan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.

2) Perkembangan Kemampuan Masyarakat Pasca-Pelatihan

Dari pernyataan para penerima program menunjukkan adanya proses pembelajaran yang gradual yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dan dari ragu-ragu menjadi terbiasa. Proses ini adalah inti dari peningkatan kompetensi dalam pemberdayaan masyarakat.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Rifqi et al. (2025) yang menemukan bahwa pendampingan dalam pemanfaatan lahan pekarangan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pertanian dan kemandirian pangan. Penelitian Hasanah et al. (2022) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem budidaya yang tepat disertai dengan pelatihan dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga secara signifikan.

3) Kepercayaan Diri Masyarakat dalam Pengelolaan Mandiri

Dari penerima program 4 menunjukkan bahwa kepercayaan diri tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang kemampuan nyata untuk berdiri sendiri.

Perkembangan kepercayaan diri ini sangat penting dalam konteks teori ACTORS (Fadeli & Musyarofah, 2022). Dalam Program SJSP, transformasi ini terlihat jelas, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri dalam beternak atau berkebun, kini telah menjadi individu yang mandiri dan yakin dengan kemampuannya.

Yunandar (2019) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Puton menemukan bahwa peningkatan kepercayaan diri masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan. Kepercayaan diri ini kemudian menjadi modal sosial yang mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan dan berinovasi dalam usahanya.

Implementasi unsur confidence and competence dalam Program SJSP di Desa Tohitisari menunjukkan hasil yang sangat positif. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh dinas pertanian dan peternakan bekerja sama dengan pemerintah desa, masyarakat penerima program telah mengalami peningkatan kompetensi yang signifikan dalam mengelola pekarangan mereka. Lebih penting lagi, mereka juga telah mengembangkan kepercayaan diri yang kuat untuk mengelola usaha mereka secara mandiri.

Keberhasilan ini tercermin dalam pernyataan-pernyataan dari berbagai informan yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah paham, terampil, mampu, dan percaya diri dalam mengelola pekarangan mereka. Beberapa bahkan telah mencapai tingkat kemandirian dimana mereka tidak lagi memerlukan bantuan eksternal. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal durasi dan kedalaman pelatihan, sistem pendampingan berkelanjutan, dan perluasan cakupan keterampilan yang diajarkan. Penguatan aspek-aspek ini akan semakin memperkuat fondasi kompetensi dan kepercayaan diri masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan keberlanjutan dan dampak Program SJSP di masa mendatang.

c. Trust (keyakinan)

Unsur trust atau keyakinan dalam pemberdayaan masyarakat merujuk pada bagaimana program mampu membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap potensi diri sendiri, manfaat program, dan prospek masa depan yang lebih baik. Dalam konteks Program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Desa Tohitisari, unsur keyakinan menjadi fondasi psikologis yang menentukan tingkat partisipasi, komitmen, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

1) Kepercayaan Masyarakat terhadap Manfaat Program SJSP

Ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan bukan hanya simbolis, tetapi substantif dan bermakna bagi kehidupan mereka. Tingkat kepercayaan yang tinggi ini sejalan dengan temuan Suhardi et al. (2021) yang menemukan bahwa ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari program pemanfaatan lahan pekarangan, kepercayaan mereka terhadap program akan meningkat secara signifikan. Penelitian Damayanti et al. (2023) juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh pengalaman positif dan hasil nyata yang dapat mereka lihat dan rasakan sendiri.

2) Keyakinan Program Sebagai Solusi Jangka Panjang

Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan mereka terhadap potensi jangka panjang didasarkan pada pengalaman nyata dalam jangka pendek. Mereka telah merasakan bahwa hasil dari pekarangan mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dari

pengalaman ini mereka mengekstrapolasi bahwa program dapat menjadi solusi ekonomi yang berkelanjutan.

Temuan ini konsisten dengan teori ACTORS. Dalam kasus Program SJSP, keyakinan ini berkembang dalam dua dimensi: pertama, keyakinan terhadap program itu sendiri; dan kedua, keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Penelitian Yunandar (2019) tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Puton menemukan bahwa keyakinan masyarakat terhadap keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh bukti nyata dari keberhasilan program dan dukungan yang konsisten dari berbagai pihak. Hal serupa terlihat dalam Program SJSP di Desa Tohitisari, dimana keyakinan masyarakat dibangun melalui pengalaman positif mereka dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa dan dinas terkait.

3) Perubahan Sikap Masyarakat terhadap Pemanfaatan Pekarangan

Perubahan sikap yang dilaporkan oleh semua informan ini menunjukkan bahwa Program SJSP telah berhasil tidak hanya mengubah praktik pengelolaan lahan, tetapi juga mengubah mindset dan nilai-nilai masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya yang mereka miliki. Perubahan mindset ini adalah bentuk pemberdayaan yang paling fundamental dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Andriyani et al. (2017) yang menemukan bahwa program pemberdayaan yang berhasil tidak hanya mengubah kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mengubah tata nilai sosial dan budaya mereka. Dalam kasus Desa Wisata Penglipuran, program pemberdayaan menghasilkan perubahan dalam cara masyarakat memandang dan mengelola aset budaya mereka. Dalam kasus Desa Tohitisari, program SJSP menghasilkan perubahan dalam cara masyarakat memandang dan mengelola aset fisik berupa pekarangan mereka. Penelitian Rifqi et al. (2025) juga menemukan bahwa pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan rumah tangga. Perubahan kesadaran ini kemudian memotivasi perubahan perilaku dalam pemanfaatan lahan.

Implementasi unsur trust dalam Program SJSP di Desa Tohitisari menunjukkan hasil yang sangat positif. Masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap manfaat program, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan ini tidak hanya terhadap program itu sendiri, tetapi juga terhadap kemampuan diri mereka sendiri untuk memanfaatkan program demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program telah berhasil mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan pekarangan. Perubahan dari membiarkan pekarangan kosong menjadi memanfaatkannya secara produktif menunjukkan transformasi yang fundamental dalam mindset dan nilai-nilai masyarakat. Trust yang telah dibangun melalui Program SJSP bukan hanya modal psikologis, tetapi juga modal sosial yang sangat berharga untuk keberlanjutan program dan untuk program-program pemberdayaan lainnya di masa depan. Namun, trust ini perlu terus dijaga dan diperkuat melalui dukungan yang konsisten, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan pengelolaan ekspektasi yang realistis.

d. Opportunities (kesempatan)

Konsistensi dalam jawaban semua informan menunjukkan bahwa akses pasar bukan merupakan hambatan signifikan bagi penerima program, setidaknya untuk pasar lokal. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun akses ke pasar lokal tersedia, jangkauan pasar masih terbatas. Semua informan menyebutkan pasar terdekat atau

tetangga sebagai jalur pemasaran utama. Tidak ada yang menyebutkan akses ke pasar yang lebih luas seperti pasar kabupaten atau kota, apalagi pasar regional atau online. Keterbatasan jangkauan pasar ini dapat menjadi ceiling bagi pengembangan usaha dalam jangka panjang.

Temuan ini memiliki implikasi penting. Di satu sisi, ketersediaan pasar lokal yang dapat diakses dengan mudah adalah fondasi yang baik untuk tahap awal pengembangan usaha. Masyarakat dapat belajar berbisnis dengan risiko yang relatif rendah dan biaya transaksi yang minimal. Di sisi lain, untuk pengembangan jangka panjang dan peningkatan skala usaha, perluasan akses pasar akan menjadi kebutuhan yang krusial. Penelitian Andriyani et al. (2017) tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata menemukan bahwa kurangnya kegiatan promosi dan keterbatasan akses pasar menjadi salah satu kendala dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Desa Tohitisari, meskipun akses pasar lokal tersedia, perluasan ke pasar yang lebih luas akan memerlukan strategi promosi dan pemasaran yang lebih sistematis.

Implementasi unsur opportunities dalam Program SJSP di Desa Tohitisari menunjukkan hasil yang positif. Program telah berhasil membuka peluang-peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang sebelumnya tidak produktif. Masyarakat dapat menjual hasil ternak dan tanaman mereka ke pasar lokal dan tetangga, memberikan tambahan pendapatan yang berarti bagi ekonomi keluarga. Namun, optimalisasi peluang-peluang ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan jangkauan pasar dan kapasitas produksi. Ke depan, untuk mengoptimalkan peluang yang telah tercipta, diperlukan strategi yang lebih komprehensif meliputi pengembangan akses pasar, peningkatan kapasitas produksi, inovasi produk, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Dengan strategi-strategi ini, peluang-peluang yang telah tercipta dapat ditingkatkan menjadi sumber pendapatan yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Tohitisari.

e. Responsibilities (tanggung jawab)

Sedangkan penerima program 3 dan 4 menyatakan hal serupa, bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengelola serta menjaga hasil bantuan tersebut.

Pembagian tanggung jawab seperti ini mencerminkan prinsip partisipatif dan akuntabel dalam teori pemberdayaan. Menurut Yunandar (2019), keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk bertindak sebagai pelaku, bukan sekadar objek kebijakan. Program SJSP telah menerapkan prinsip tersebut dengan mengalihkan tanggung jawab utama pengelolaan kepada warga, sementara pemerintah desa berperan sebagai pendamping dan pengarah.

Selain itu, pembentukan struktur koordinatif hingga tingkat RT dan dusun memperlihatkan penerapan governance yang inklusif. Penelitian Mubarokah (2018) menunjukkan bahwa keberhasilan program Desa Siaga Aktif juga bergantung pada pembagian tugas yang jelas antara pemerintah dan masyarakat, dengan komunikasi dua arah yang terus dibangun. Praktik di Desa Tohitisari serupa, karena adanya pelibatan langsung kelompok PKK serta aparat dusun memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program.

Berdasarkan hasil analisis, unsur responsibilities dalam penerapan Program SJSP di Desa Tohitisari dapat disimpulkan berjalan dengan cukup baik. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menyiapkan sarana, pelatihan, serta bimbingan

teknis, sedangkan masyarakat menjadi pelaksana utama yang mengelola, merawat, dan memanfaatkan pekarangan secara mandiri. Namun, dari sisi sistem pengawasan dan evaluasi, masih dibutuhkan mekanisme formal agar setiap kegiatan dapat terpantau dengan baik dan keberlanjutan program dapat terjamin. Dengan memperkuat sistem pelaporan dan memberikan pelatihan administrasi sederhana bagi masyarakat penerima, pemerintah desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperluas dampak program SJSP. Sebagaimana ditegaskan Fadeli dan Musyarofah (2022), tanggung jawab yang terlembaga merupakan tanda bahwa masyarakat telah benar-benar berdaya tidak hanya mampu secara teknis, tetapi juga sadar akan peran sosialnya dalam pembangunan desa.

f. Support (dukungan)

Kesaksian para penerima ini memperlihatkan bahwa bantuan tidak hanya diberikan satu kali, melainkan dalam beberapa bentuk, baik untuk kebutuhan pangan maupun pengembangan usaha kecil. Dukungan tersebut menjadi bentuk konkret pelaksanaan prinsip support dalam teori ACTORS, di mana peran pemerintah bukan sebagai penyedia tunggal, tetapi sebagai penggerak yang membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang mandiri.

Secara keseluruhan, unsur support dalam implementasi Program Satu Juta Satu Pekarangan di Desa Tohitisari telah menunjukkan hasil yang positif. Pemerintah desa berhasil menyediakan dukungan nyata dalam bentuk bantuan ternak serta pelatihan. Dinas pertanian turut berperan dalam pendampingan teknis meskipun intensitasnya masih terbatas. Selain itu, peran keluarga dan tetangga memberikan kekuatan sosial yang signifikan dalam menjaga semangat dan keberlanjutan program.

Namun, untuk memperkuat dimensi keberlanjutan, dukungan perlu diperluas ke arah kelembagaan dan inovasi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha lokal dapat membuka akses pengetahuan dan pasar yang lebih luas. Pemerintah desa juga perlu menginisiasi sistem pendampingan periodik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat tidak kehilangan arah setelah bantuan fisik diberikan.

Dengan demikian, unsur support di Desa Tohitisari tidak hanya menjadi bentuk bantuan, tetapi juga sarana pembentukan solidaritas dan kapasitas masyarakat menuju kemandirian. Seperti dikatakan oleh banggainet (2024), pemberdayaan yang sejati adalah ketika dukungan eksternal bertransformasi menjadi kekuatan internal yang menggerakkan masyarakat untuk mandiri, berdaya, dan saling menolong.

Analisis penerapan program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Desa Tohitisari dilakukan menggunakan teori ACTORS yang terdiri dari enam komponen utama: authority, confidence and competence, trust, opportunities, responsibilities, dan support. Secara umum, keenam unsur ini telah berjalan, meskipun tingkat efektivitasnya masih bervariasi pada masing-masing aspek. Secara keseluruhan, penerapan program berdasarkan unsur ACTORS di Desa Tohitisari menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek pemberdayaan, terutama pada dimensi authority, trust, dan confidence. Namun, unsur support dan opportunities masih menjadi titik lemah yang perlu diperkuat agar program dapat berkelanjutan dan berdampak ekonomi lebih luas.

2. Kendala dalam Penerapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Satu Juta Satu Pekarangan di Desa Tohitisari Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai

Dalam setiap implementasi program pemberdayaan, kendala di lapangan merupakan hal yang tidak terhindarkan. Kendala dapat muncul dari faktor internal masyarakat, keterbatasan manajerial, hingga aspek eksternal seperti sarana, pendanaan, dan akses pasar. Dalam konteks Program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Desa Tohitisari, berbagai hambatan justru menjadi proses pembelajaran yang memperkuat kapasitas masyarakat serta kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan kebijakan di tingkat lokal.

a. Optimalisasi Kendala sebagai Peluang Pemberdayaan

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak memandang kendala sebagai hambatan murni, tetapi sebagai potensi yang dapat diolah untuk menciptakan inovasi. Misalnya, pekarangan yang awalnya dianggap tidak produktif justru menjadi aset lokal yang dapat dioptimalkan sebagai sumber ekonomi rumah tangga.

Dalam perspektif teori ACTORS Fadeli dan Musyarofah (2022), pendekatan Kepala Desa ini mencerminkan unsur Opportunities yang berangkat dari tantangan. Pemanfaatan hambatan sebagai peluang menunjukkan tingkat kematangan aktor lokal dalam menjalankan prinsip pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rifqi et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan program berbasis pekarangan sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam mengubah kendala menjadi potensi baru.

Dengan demikian, strategi Kepala Desa Tohitisari merepresentasikan cara berpikir adaptif yang menempatkan kendala sebagai bagian integral dari proses belajar kolektif. Pendekatan ini juga mencerminkan resilience sosial masyarakat desa dalam menghadapi keterbatasan sumber daya.

b. Pendataan yang Belum Tertib dan Kurangnya Tindak Lanjut

Kendala ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem dokumentasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program. Ketidakteraturan data penerima dapat menimbulkan tumpang tindih bantuan serta kesulitan dalam mengukur hasil program secara akurat. Solusi berupa pembuatan database penerima yang tertib sejalan dengan prinsip transparency dalam tata kelola desa. Dengan adanya basis data yang rapi, pemerintah desa dapat melakukan pemetaan potensi dan kebutuhan secara lebih terarah.

Dalam penelitian Yunandar (2019), disebutkan bahwa pengelolaan data yang akurat menjadi faktor penentu keberhasilan program pemberdayaan, karena data tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya. Secara teoretis, temuan ini mengindikasikan bahwa elemen Authority dan Support dalam teori ACTORS perlu diperkuat melalui sistem informasi yang lebih baik agar proses pemberdayaan dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

c. Kurangnya Konsistensi Warga dan Minimnya Solidaritas Kelompok

Kendala ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan komitmen sebagian warga masih berfluktuasi. Ketidakkonsistenan dalam merawat pekarangan dapat disebabkan oleh faktor motivasi yang menurun atau kurangnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Solusi yang diusulkan, membentuk kelompok tani merupakan langkah yang sangat relevan. Pembentukan kelompok tidak hanya memudahkan koordinasi, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

Menurut Andriyani et al. (2017), keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial yang solid, karena di dalam kelompoklah terjadi proses saling belajar dan berbagi pengalaman. Dari sisi teori ACTORS, pembentukan kelompok tani berfungsi memperkuat unsur Trust dan

Confidence, di mana rasa percaya antarwarga menjadi energi sosial yang menjaga keberlanjutan program. Pendekatan berbasis komunitas ini juga sejalan dengan semangat social capital yang dikemukakan oleh Suharto (2020), bahwa solidaritas adalah pondasi pemberdayaan yang tahan terhadap kendala jangka panjang.

d. Kendala Ekonomi yaitu Biaya Pakan yang Tinggi

Hal ini menunjukkan bahwa beban ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program peternakan rumah tangga. Ketika biaya operasional meningkat, masyarakat cenderung mengurangi intensitas perawatan atau bahkan berhenti sementara. Solusi berupa subsidi atau bantuan pakan dari desa merupakan langkah praktis jangka pendek yang bisa membantu penerima program mempertahankan usahanya.

Penelitian Rifqi et al. (2025) menemukan bahwa keberhasilan program pekarangan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat menjaga keberlanjutan input produksi. Oleh karena itu, dukungan berupa subsidi bahan pakan atau pelatihan pembuatan pakan alternatif lokal dapat menjadi solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa, kendala utama dalam penerapan program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Desa Tohitisari meliputi aspek teknis, sosial, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Secara teknis, keterbatasan sarana produksi, ketersediaan pakan, serta minimnya keterampilan beternak menyebabkan sebagian penerima bantuan belum optimal mengelola usaha pekarangannya. Dari sisi sosial, masih terdapat masyarakat yang pasif dan menganggap program ini sebatas bantuan, bukan sarana pemberdayaan, sehingga partisipasi dan rasa tanggung jawab mereka rendah. Sementara dari aspek kelembagaan, koordinasi antarperangkat desa, kelompok penerima, dan instansi pendukung belum berjalan maksimal, terutama dalam hal pemasaran hasil ternak dan keberlanjutan pendampingan. Akibatnya, dampak ekonomi program belum merata di seluruh penerima manfaat. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan pelatihan teknis, penguatan kerja sama lintas sektor, serta pembentukan kelembagaan ekonomi lokal agar program dapat berkelanjutan dan benar-benar mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan program Satu Juta Satu Pekarangan di Desa Tohitisari, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Desa Tohitisari berjalan cukup baik dan menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan lahan pekarangan. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah desa, BPD, kelompok PKK, dan masyarakat penerima manfaat melalui pendekatan berbasis teori ACTORS. Unsur authority, confidence and competence, trust, opportunities, responsibilities, dan support diterapkan secara bertahap untuk membangun rasa percaya diri, kemampuan teknis, serta tanggung jawab sosial masyarakat. Dampaknya terlihat dari perubahan perilaku warga yang kini lebih aktif memanfaatkan pekarangan untuk kegiatan produktif seperti peternakan dan pertanian rumahan. Masyarakat tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga menunjukkan peningkatan motivasi, kemandirian, dan solidaritas sosial dalam menjaga keberlanjutan program.

2. Meskipun memberikan dampak positif, pelaksanaan program SJSP menghadapi sejumlah kendala teknis, sosial, dan kelembagaan. Dari sisi teknis, keterbatasan sarana

produksi, bibit, dan pakan menjadi hambatan utama. Secara sosial, partisipasi masyarakat belum merata karena masih ada warga yang pasif dan bergantung pada bantuan. Sementara dari aspek kelembagaan, koordinasi antara perangkat desa, kelompok tani, dan dinas terkait belum berjalan optimal. Kendala administratif seperti pendataan yang kurang tertib serta kurangnya tindak lanjut pasca bantuan juga turut menghambat efektivitas program. Namun, kendala-kendala ini telah dijadikan pembelajaran oleh pemerintah desa untuk memperkuat strategi adaptif dan mengubah tantangan menjadi peluang pemberdayaan masyarakat di masa mendatang.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., & Faried, A. I. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Andriyani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1–16.
- Damayanti, C. N., Hannan, M., & Hidayat, S. (2023). Pemberdayaan Wanita dalam Pemanfaatan Pekarangan Rumah dengan Tanaman Herbal untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kampung KB Desa Pangarangan Kabupaten Sumenep. *Jurnal Abdiraja*, 6(1), 52–56.
- Fadeli, M., & Musyarofah, L. (2022). Analisis Teori ACTORS Peran Perempuan PGRI Jawa Timur dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 6(1), 24–38.
- Feto, W., Bali, Y. F., Dungan, K., Bhoki, E., Qondias, D., Bhoke, W., Meka, M., & Lawe, Y. U. (2025). Pendampingan Pemanfaatan Pekarangan Rumah di Desa Waepana. *Jurnal Citra Kuliah Kerja Nyata STKIP Citra Bakti*, 3(1), 27–34. <https://doi.org/10.38048/jckkn.v3i1.3375>
- Huda, R. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 157–170.
- Hasanah, N., Hidayatullah, T. S., Hadid, M. M., & Gunawan, I. F. N. A. (2022). Penerapan Sistem Budikdamber di Pekarangan Rumah Masyarakat Desa Jayagiri untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 4(2), 188–196.
- Ritonga, M., Kertahadi, & Rahayu, S. M. (2023). Pengaruh Financial Leverage terhadap Profitabilitas. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Rifqi, M. H. H., Stephanie, N. A., Setiawan, R. B., Ibrahim, H. A., Megasari, D., & Atasa, D. (2025). Pendampingan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Penanaman Sayuran Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Jember. *Khidmatuna: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 251–268.
- Suhardi, Sangadji, S. S., Ibrahim, H., & Rachman, S. (2021). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kegiatan Penganekaragaman Pangan Lestari. *Global Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 86–92.

Anies Handayani¹

Yunandar, D. T. (2019). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Puton Watu Ngelak dalam Perspektif Dinamika Kelompok. *Jurnal Triton*, 10(2), 62-83.